

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pemangku kepentingan serta memetakan pemangku kepentingan berdasarkan pengaruh dan kedekatan dari tiap pemangku kepentingan. Pada penelitian ini juga turut menciptakan sebuah strategi komunikasi mengenai pencegahan dan pengendalian PMK di Sulawesi Selatan.

Tujuan tersebut melatarbelakangi pembuatan rumusan masalah yang pertama, yakni bagaimana analisis pemangku kepentingan dalam penanganan pandemi hewan PMK. Unsur-unsur yang diteliti oleh peneliti meliputi identifikasi pemangku kepentingan yang juga terdiri atas analisis situasi, kategorisasi pemangku kepentingan, dan pemetaan pemangku kepentingan.

Selanjutnya, rumusan kedua berkaitan dengan pembuatan strategi komunikasi berdasarkan analisis pemangku kepentingan dalam penanganan pandemi hewan PMK. Pembahasan mengenai kunci strategi SBCC turut dikaji untuk mendapatkan pendekatan strategi komunikasi. Unsur-unsur lainnya yang menjadi pengamatan peneliti dalam strategi komunikasi pencegahan dan pengendalian PMK adalah target audiens, pesan, dan saluran komunikasi yang digunakan.

#### **5.1.1 Analisis Pemangku Kepentingan**

Pembahasan terkait analisis pemangku kepentingan mencakup tiga aspek, yakni identifikasi pemangku kepentingan, kategorisasi pemangku kepentingan, dan pemetaan pemangku kepentingan. Dalam konteks ini, pemangku kepentingan merupakan aktor utama dan pendukung dalam kampanye pencegahan dan pengendalian PMK di Sulawesi Selatan.

Pertama, terdapat 19 pemangku kepentingan yang dapat diidentifikasi sebagai aktor yang memiliki peran dalam kampanye pencegahan dan pengendalian PMK di Sulawesi Selatan. Mereka terbagi dalam tiga jenis pemangku kepentingan, yaitu komunitas, pemerintah, dan masyarakat.

Berbagai aktor pemangku kepentingan dibagi ke dalam delapan kategorisasi yang ditentukan oleh atribut pemangku kepentingan dan perannya, yakni sebagai regulator atau pembuat kebijakan, implementator, fasilitator, akselerator, dan koordinator serta uniknya tidak ditemukan pemangku kepentingan yang termasuk dalam kategori *demanding stakeholder*, di mana pemangku kepentingan hanya memiliki urgensi terhadap PMK.

Terakhir, berdasarkan kedekatan serta pengaruh yang dimiliki oleh masing-masing pemangku kepentingan terlihat bahwa kedekatan peternak dengan penyuluh juga inseminator didasari oleh asas kebutuhan dari peternak, minimnya kolaborasi lintas sektoral yang dapat mendukung peningkatan cakupan vaksinasi, mispersepsi peternak terhadap Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH), keterlibatan keamanan publik membantu yang peningkatan cakupan vaksinasi PMK.

### **5.1.2 Strategi Komunikasi**

Pembahasan mengenai strategi komunikasi tidak hanya didasari oleh analisis pemangku kepentingan, tetapi terdapat analisis situasi yang dilakukan secara mendalam mengenai pencegahan dan pengendalian PMK di Sulawesi Selatan.

Selama periode 2022-2023, DPKH tingkat kabupaten juga provinsi telah melakukan berbagai upaya dalam mengendalikan persebaran PMK. Upaya yang telah dilakukan berkenaan dengan diseminasi informasi melalui berbagai saluran komunikasi, seperti penyuluhan, penyelenggaraan *talkshow*, pemberian vitamin dan obat-obatan, distribusi informasi melalui media sosial, pelibatan keamanan publik, dan penerapan kebijakan wajib vaksin.

Namun, beberapa hal tidak sesuai dengan karakteristik peternak di lapangan. Peternak memiliki kecenderungan untuk mempercayai informasi dari penyuluh juga testimoni sesama peternak. Tidak hanya itu, peternak juga menyukai gambar-gambar serta warna yang menarik dalam membaca dan memahami informasi melalui media cetak serta menonton video yang terdapat testimoni juga ajakan dari tokoh berpengaruh.

Sementara itu, paparan hoaks mengenai efek samping vaksin yang cukup tinggi dari media sosial juga pedagang dan sandro menjadi hambatan yang belum terselesaikan. Ketakutan terhadap vaksin juga mendukung penolakan peternak untuk memvaksin hewan ternaknya. Pasalnya, hewan ternak dijadikan sebagai aset juga tabungan oleh peternak dan minimnya informasi mengenai vaksin. Tidak hanya itu, penolakan pun kerap terjadi karena akses atau infrastruktur yang tidak mendukung. Hal ini juga berpengaruh terhadap kepercayaan peternak pada hal-hal alternatif karena rendahnya intensitas komunikasi secara langsung antara peternak dengan penyuluh, inseminator, maupun paramedik atau medik.

Maka dari itu, terbentuklah tiga objektif yang dapat diwujudkan untuk mencegah dan mengendalikan PMK di Sulawesi Selatan, yaitu mendorong perubahan perilaku pencegahan PMK melalui kampanye efektif pada tingkatan individu dan komunitas, meningkatkan partisipasi aktif untuk mendorong perilaku preventif dalam pencegahan PMK, dan mempromosikan vaksinasi dosis lanjutan PMK melalui implementasi kebijakan terkait.

Tiga objektif tersebut didukung oleh tiga aspek *Social Behaviour Change Communication* (SBCC), yaitu perubahan perilaku komunikasi, mobilisasi sosial, dan advokasi. Pendekatan ini dilakukan guna menangani isu PMK yang berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap masyarakat.

Perubahan perilaku komunikasi ditujukan kepada kelompok audiens primer yang ditandai dengan adanya peningkatan pengetahuan, sikap, dan praktik audiens terhadap praktik biosekuriti dan vaksinasi. Mobilisasi sosial ditandai dengan partisipasi masyarakat lebih luas dengan adanya hubungan sesama individu dalam bermasyarakat. Terakhir, advokasi untuk meningkatkan sumber daya dan komitmen kepemimpinan politik/sosial untuk tindakan dan tujuan pembangunan yang dilihat dari regulasi pembatasan jalur lalu lintas ternak dan kebijakan vaksinasi serta pemasangan *eartag*.

Diseminasi informasi pun dapat dilakukan selaras dengan karakteristik peternak, seperti pemanfaatan media sosial, penyesuaian materi KIE dengan pendekatan bahasa daerah, dan pemanfaatan media digital.

## **5.2 Implikasi**

Berdasarkan pemaparan kesimpulan di atas, terdapat dua implikasi yang dapat ditinjau dari aspek bidang akademis dan aspek penelitian secara praktis. Pemaparan implikasi ini didasari oleh temuan-temuan yang telah dipaparkan sebelumnya. Berikut merupakan penjelasan lebih lanjut berkaitan dengan implikasi penelitian.

### **5.2.1 Implikasi Akademis**

Di lihat dari perspektif akademis, analisis pemangku kepentingan dan strategi komunikasi dalam pencegahan dan pengendalian PMK berkontribusi dalam model analisis pemangku kepentingan dan model strategi komunikasi. Temuan mengenai identifikasi pemangku kepentingan, kategorisasi pemangku kepentingan, dan pemetaan pemangku kepentingan serta sebuah strategi komunikasi berkenaan wabah penyakit PMK dapat memperkaya kajian teoritis baru terkait PMK.

Bagi institusi pendidikan, temuan-temuan dari penelitian ini juga menawarkan kebaruan, terutama dalam kategorisasi pemangku kepentingan dan strategi komunikasi dalam memutus rantai persebaran PMK. Pencegahan dan pengendalian PMK dipengaruhi oleh partisipasi serta kolaborasi masing-masing pemangku kepentingan yang saling berhubungan.

### **5.2.2 Implikasi Praktis**

Dilihat dari sisi praktis, temuan penelitian ini bisa menjadi referensi bagi pemerintah, praktisi kesehatan hewan, dan masyarakat umum untuk lebih memahami kebutuhan dan karakteristik masing-masing pemangku kepentingan dalam pencegahan dan pengendalian PMK. Unsur-unsur terkait penerimaan dan penolakan vaksin PMK hingga peran masing-masing pemangku kepentingan serta pendekatan komunikasi untuk mewujudkan peningkatan cakupan vaksinasi dan praktik biosekuriti telah

dijelaskan pada penelitian ini dan bisa menjadi panduan oleh pemerintah, praktisi kesehatan hewan, dan masyarakat umum dalam menghadapi PMK.

### **5.3 Rekomendasi**

Berdasarkan hasil pemaparan temuan penelitian ini dapat menjadi rekomendasi bagi beberapa pihak yang berkaitan dengan kesehatan hewan. Rekomendasi terdiri atas dua bagian, yakni rekomendasi bagi akademis dan rekomendasi bagi praktisi. Berikut pemaparan lebih lanjut mengenai rekomendasi penelitian.

#### **5.3.1 Rekomendasi Akademis**

Dari aspek akademis, penelitian ini telah mengeksplorasi mengenai pemangku kepentingan sebagai landasan dari pembuatan strategi komunikasi mengenai wabah penyakit hewan. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya untuk mengeksplorasi model analisis pemangku kepentingan yang lebih komprehensif dari unsur hubungan sesama pemangku kepentingan. Pengamatan subjek lain, seperti kasus PMK di wilayah lain juga bisa dilakukan untuk membandingkan keterlibatan pemangku kepentingan dalam pencegahan dan pengendalian PMK.

Selain itu, peneliti menemukan temuan yang menonjol mengenai pendekatan budaya yang sangat berpengaruh terhadap persepsi dan perubahan perilaku komunikasi dalam vaksinasi PMK dan praktik biosekuriti. Oleh karena itu, peneliti merekomendasikan penelitian selanjutnya untuk fokus mengamati perubahan perilaku komunikasi dari perspektif budaya lain.

#### **5.3.2 Rekomendasi Praktis**

Dari aspek praktis, peneliti ingin memberikan beberapa rekomendasi bagi pemangku kepentingan terkait. Bagi pemerintah, dalam membuat kebijakan terkait penanganan wabah penyakit PMK, khususnya kebijakan vaksinasi, lalu lintas ternak, dan praktik biosekuriti, diharapkan dapat mempertimbangkan unsur budaya dan sosial yang berkembang di kalangan peternak. Kedua unsur ini berpengaruh terhadap penerimaan vaksinasi PMK dan praktik biosekuriti sebagai tindakan preventif PMK, sehingga pembuatan kebijakan memerlukan pendekatan yang menyentuh aspek yang peternak miliki.

Bagi praktisi kesehatan hewan, menghadapi individu yang memiliki penolakan terhadap vaksin memerlukan peningkatan kompetensi komunikasi dalam mengubah perilaku komunikasi agar efektif. Sementara itu, bagi masyarakat umum peneliti merekomendasikan untuk memahami aktor-aktor yang terlibat dan dukungan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan pemangku kepentingan utama dalam pencegahan dan pengendalian PMK melalui berbagai platform yang sesuai.